



GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

“POTENSI PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS JAWA BARAT”

Disampaikan oleh :

AHMAD HERYAWAN
GUBERNUR JAWA BARAT



Pada Acara

International Conference On Islamic Finance 2015

Jakarta, 15 November 2015

Hotel Indonesia Kempinski



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

SISTEMATIKA

1

PENDAHULUAN

2

GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

3

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
JAWA BARAT

4

PENERBITAN OBLIGASI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

5

PENUTUP

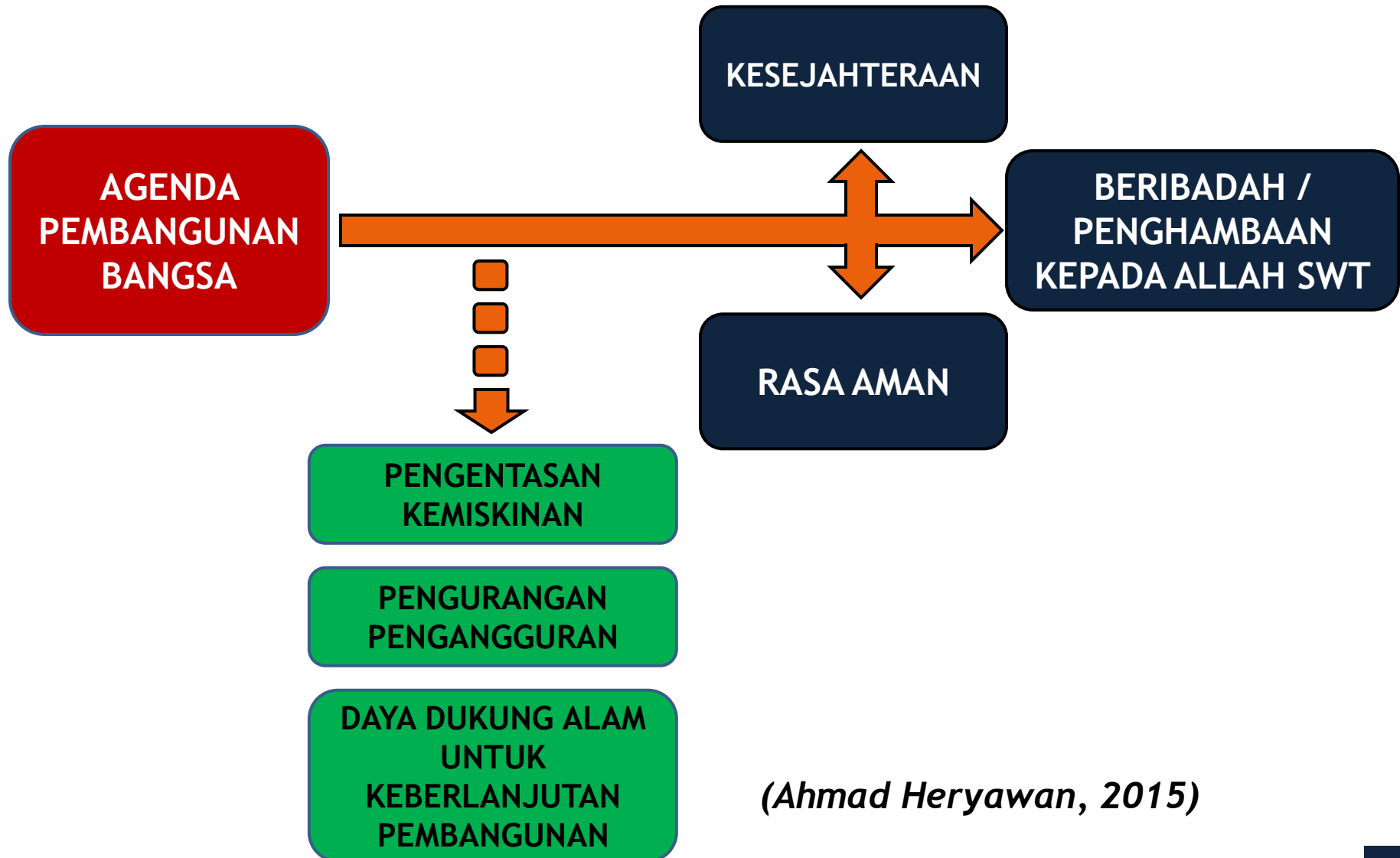


PENDAHULUAN



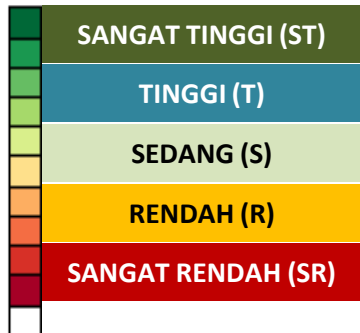
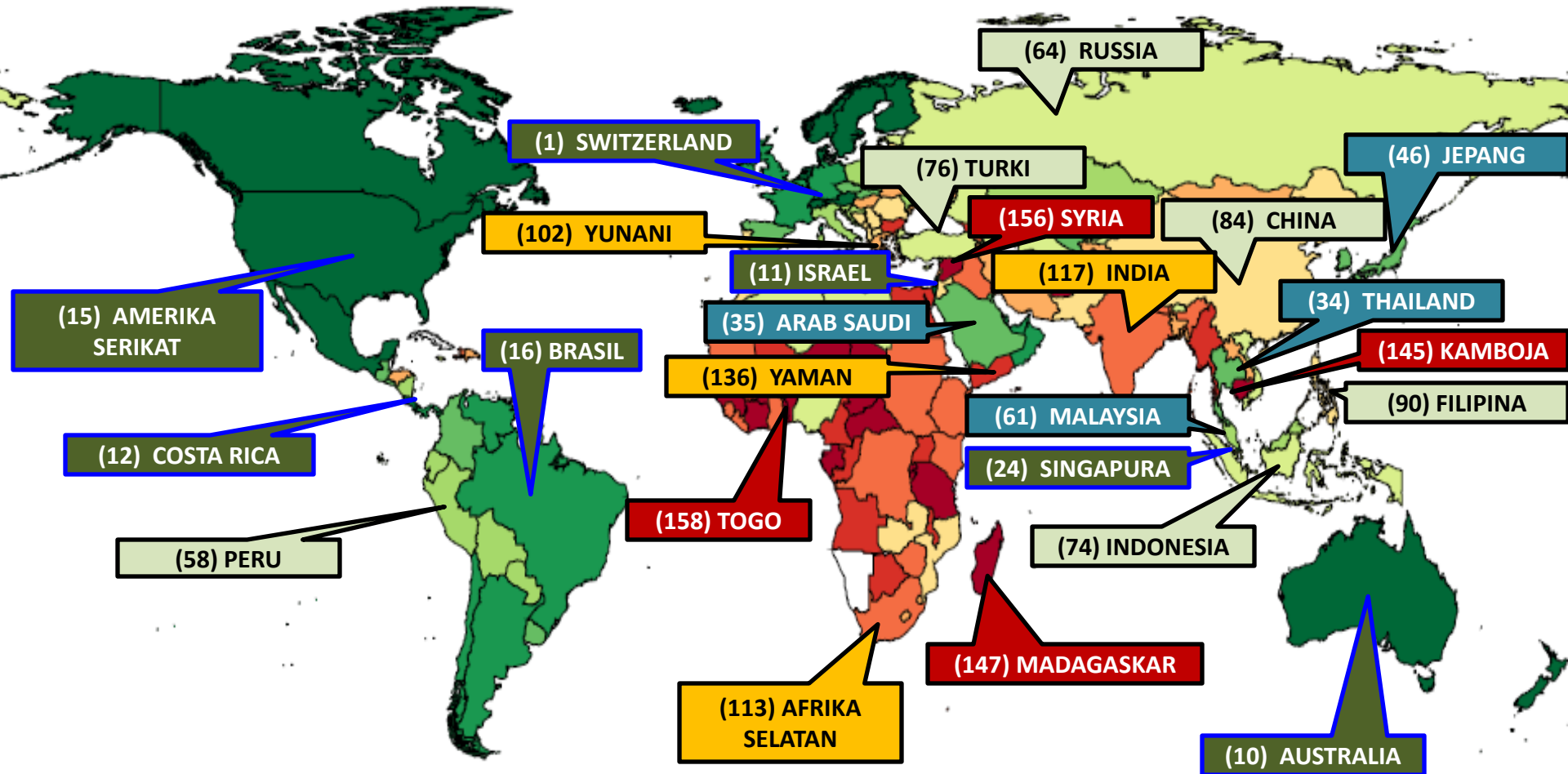


KEBERMAKNAAN PEMBANGUNAN



(Ahmad Heryawan, 2015)

LAPORAN KEBAHAGIAN DUNIA (WORLD HAPPINESS REPORT / WHR 2015)



Melibatkan 158 Negara, dengan indikator:

1. GDP per kapita
2. Dukungan Sosial
3. Kesehatan dan Angka Harapan Hidup
4. Kebebasan memilih dan berpendapat
5. Kemurahan hati, keramah tamahan
6. Persepsi korupsi

Sumber: Buku World Happiness Report 2015



Diolah oleh: Konseptor Gubernur Jabar (Agustus 2015)

INDEKS KEAMANAN DUNIA (GLOBAL PEACE INDEX / GPI 2015)

NEGARA (RANKING) 2015

NILAI

RANKING 2013

VERY HIGH

HIGH

MEDIUM

LOW

VERY LOW

Jumlah Negara yang disurvei 162 Negara, Kriteria:

- **Keamanan berbasis masyarakat:** pendapatan, pendidikan, dan integritas masyarakat.
- **Keamanan berbasis negara:** Kualitas Pelayanan Negara, Tingkat Korupsi / Akuntabilitas Pemerintahan / Transparansi
- **Stabilitas dan Keutuhan Negara**

Institute of Economics and Peace
(Sydney - New York)

Islandia (1)	1.148
Slandia Baru (4)	1.221
Australia (9)	1.392
Singapura(24)	1.490
Mauritius (25)	1.503
Malaysia (28)	1.561
Inggris (39)	1.685
Prancis (45)	1.742
Indonesia (46)	1.768
Vietnam (56)	1.848
Amerika (94)	2.038
Arab Saudi (95)	2.042
Kamboja (111)	2.179
Honduras (116)	2.210
Turki(135)	2.363
Filipina (141)	2.462
Yaman (147)	2.751
Israel (148)	2.781
Rusia (152)	2.954
Pakistan (154)	3.049
Afganistan (160)	3.427
Suriah (162)	3.645

(54)

(99)

(97)

(152)

(150)

(162)



GAMBARAN UMUM JAWA BARAT



JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL

POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL :

- JUMLAH PENDUDUK **TERBANYAK 46.029.699 Jiwa (2014)**
- PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL
- INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), DIANTARANYA BERKELAS DUNIA
- **BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA**
- **MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P**
- MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS
- MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL :

- BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL (14,33%)
- **KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR (60%)**
- KONTRIBUSI PMA JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL (34,46%)
- **MENYUMBANG PRODUKSI BERAS NASIONAL (17,76%)**
- **PROVINSI PRODUSEN KOMODITI EKSPOR NASIONAL (AS 18,4%, Jepang 12,52%)**

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI :

- **LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI**
- **PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI**
- PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW
- LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)
- MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
- MERUPAKAN TUJUAN WISATA
- DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN

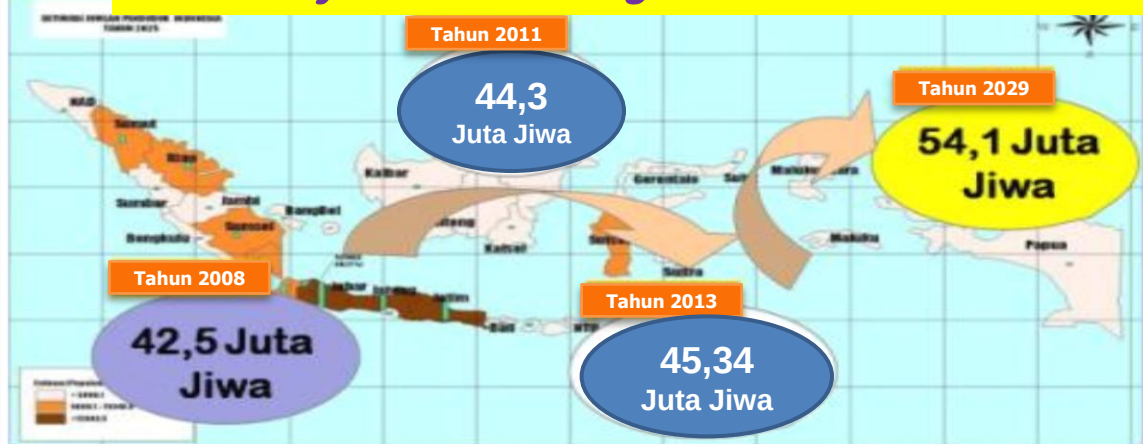
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA :

- PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI
- PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI
- PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI

Luas Jawa Barat :
3.711.654 ha

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2014)

Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk



Kabupaten/Kota : 27
 Luas : 3.709.528,44 Ha
 Kecamatan : 626
 Kelurahan : 641
 Desa : 5.321

Penduduk

Indonesia (2012) : 242.013.800 Jiwa
 Jabar (2014) : 46.029.699 Jiwa
 Penduduk Miskin (2014) : 9,18 %

Jumlah Penduduk Per BKPP Tahun 2013

BKPP Wilayah I Bogor	13.122.850
BKPP Wilayah II Purwakarta	10.192.779
BKPP Wilayah III Cirebon	6.280.780
BKPP Wilayah IV Garut	15.744.390
JAWA BARAT	45.340.799

PDRB (2014) : Rp.1.387,28 Trilyun (adhb);

PDRB per kapita (2014) : Rp.30,14 Juta (adhb)

Inflasi (2014) : 6,16%

LPE (2014) : 5,07%

IPM (2014) : 74,28

RLS (2014) : 8,34 th

AMH (2014) : 98,29 %

AHH (2014) : 68,83 th

AKI : 217 per 100.000 Kel Hidup (2012)

AKB : 30 per 1.000 Kel Hidup (2013)

APK PAUD : 60,48 % (2013 - 2014)

APK SD : 108,89 % (2013 - 2014)

APK SMP : 95,35 % (2013 - 2014)

APK SMA : 61,19 % (2013 - 2014)

APK PT : 19,19 % (2013 - 2014)

Kemantapan Jalan : 97,68%

Rasio elektrifikasi : 83,77%

Pelayanan Air Minum : 65,43%

Irigasi Kondisi Baik : 67,37%

Kawasan Lindung : 37,40%



VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 - 2025 DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

**VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018**
**JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK
SEMUA**

MISI

MISI PERTAMA :
Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing

MISI KEDUA :
Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

MISI KETIGA :
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

MISI KEEMPAT :
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

MISI KE LIMA :
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal



VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI **Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025**

1. **PENYELENGGARAAN** Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI.
3. **PENGLOLAAN** Pertanian dan Kelautan.
4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA **PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR.**
5. Industri Manufaktur, **INDUSTRI JASA** dan **INDUSTRI KREATIF.**
6. *Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.*
7. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.



SASARAN PERTAMA DARI MISI KE-4

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Strategis Jawa Barat

Infrastruktur Jalan dan Kereta Api

- Pembangunan jalan TOL Cisumdawu, TOL Cikapali, TOL Soreang Pasirkoja ,
- Pembangunan TOL Cileunyi- Tasikmalaya (CITAS), TOL Ciawi – Sukabumi
- Mendorong pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati - Cirebon
- Mendorong pembangunan jalur kereta api khusus barang/ kargo
- Pembangunan Monorel di Kawasan Metropolitan

Infrastruktur Perhubungan

- Pembangunan Bandara Kertajati
- Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya
- Pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman
- Pembangunan jalan status provinsi di perbatasan Propinsi dan perbatasan Kota/ Kabupaten
- Pengembangan terminal angkutan umum regional yang terpadu dan modern

Infrastruktur Sumber Daya Air

- Penuntasan pembangunan Waduk Jati Gede
- Perbaikan dan perluasan jaringan irigasi
- Perlindungan dan pengelolaan situ dan mata air
- Meningkatkan pengadaan air bersih bagi masyarakat

Tata Ruang dan Energi

- Harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP),
- Zonasi Pembangunan kawasan industri terpadu
- Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
- Peningkatan rasio elektrifikasi keluarga
- Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan

Sarana Permukiman dan Perkantoran

- Pembangunan Hunian Vertikal
- Penyediaan air minum skala metropolitan
- Pembangunan drainase skala metropolitan
- Pembangunan pengolahan sampah kawasan metropolitan Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon Raya

TUNTUTAN SINERGI MULTIPIHAK DALAM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Pemerintahan



1. Sinergi Pembangunan Pusat - Daerah
2. *Incentive Regulation* dan Investasi
3. Stabilitas dan Kepastian Aturan dan Hukum
4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
5. Pelayanan melebihi ekspektasi dan Profesional
6. Otonomi dan Pemerataan Pembangunan
7. Memelihara ketentraman dan ketertiban masy.

Dunia Usaha



1. Daya Saing Tinggi
2. Menciptakan Pelaku Usaha-Usaha Baru
3. Kolaborasi dan Kemitraan besar dengan UMKM
4. Tanggung Jawab Sosial
5. Kreativitas dan Inovasi
6. Bergaul secara Global dan Perluasan Pasar

Masyarakat



1. Mengawal Pembangunan
2. Partisipasi aktif
3. Meningkatkan kualitas individu dan produktivitas
4. Terbuka, kritis dan korektif
5. Perkuatan Modal sosial

Akademisi



1. Merancang Terobosan IPTEK Mutakhir
2. Penerapan IPTEK dalam pembangunan

Kepastian dan Penegakan Hukum

Penguatan peran Penegak Hukum (Kejaksaan, Polri, KPK dll) dengan mengedepankan fungsi pembinaan dan pencegahan bukan mengedepankan fungsi penindakan

Keamanan dan Ketertiban

Penguatan peran TNI / Polri dalam menghadirkan rasa aman dan kondisi tertib di masyarakat serta mencegah ancaman baik dari internal maupun eksternal



PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, BERDAYA SAING, BERKEADILAN DAN BEKESINAMBUNGAN



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS JAWA BARAT



RENCANA JALAN TOL DAN NON TOL DI JAWA BARAT (2009-2025)

NO	JALAN TOL	Rencana Pembangunan	Dana (Trilyun)
1	Soreang-Pasirkoja (10,57 Km)	2010-2018	2,30
2	Bandung Intra Urban Toll Road/BIUTR (27,3 Km)	2014-2020	8,28
3	Cikopo-Palimanan (Cipali) (116 km)	2010-2016	12,60
4	Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km)	2010-2017	11,32
5	Ciawi-Sukabumi (54 km)	2009-2020	7,78
6	Sukabumi-Ciranjang (28 Km)	2016-2021	5,86
7	Ciranjang-Padalarang (33 Km)	2018-2023	6,12
8	Cimanggis-Cibitung (25,9 km)	2009-2019	5,80
9	Cikarang-Tj.Priok (34,5 km)	2009-2018	2,83
10	Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya (55 Km)	2015-2019	13,00
11	Tasikmalaya-Ciamis-Banjar (52 Km)	2017-2022	13,00
12	Banjar-Pangandaran (40 Km)	2017-2023	13,00
	TOTAL		101,89

NO	JALAN NON TOL/ NON STATUS (APBN)	Rencana Pembangunan	Dana (Trilyun)
13	Jalan Puncak II : (Sentul) – Sp. Sukamakmur – Kota Bunga – Cipanas (Cianjur) (67,65 Km)	2012-2018	0,81
14	Jalan Poros Tengah - Purwakarta (Jatiluhur) - Jonggol (Cariu) – Sp. Sukamakmur (89,64 Km)	2012-2018	0,77
	TOTAL		1,58

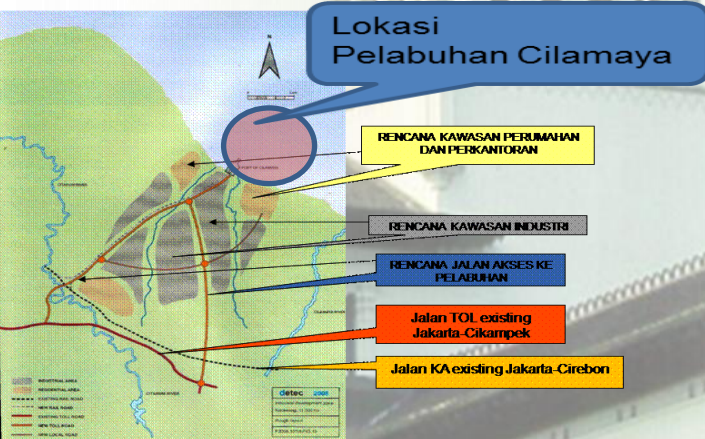


RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN CILAMAYA DI KABUPATEN KARAWANG

	KOMPONEN	DIMENSI
Alur	Lebar (m)	380
	Kedalaman (m)	17
Basin	Diameter (m)	730
	Kedalaman (m)	17

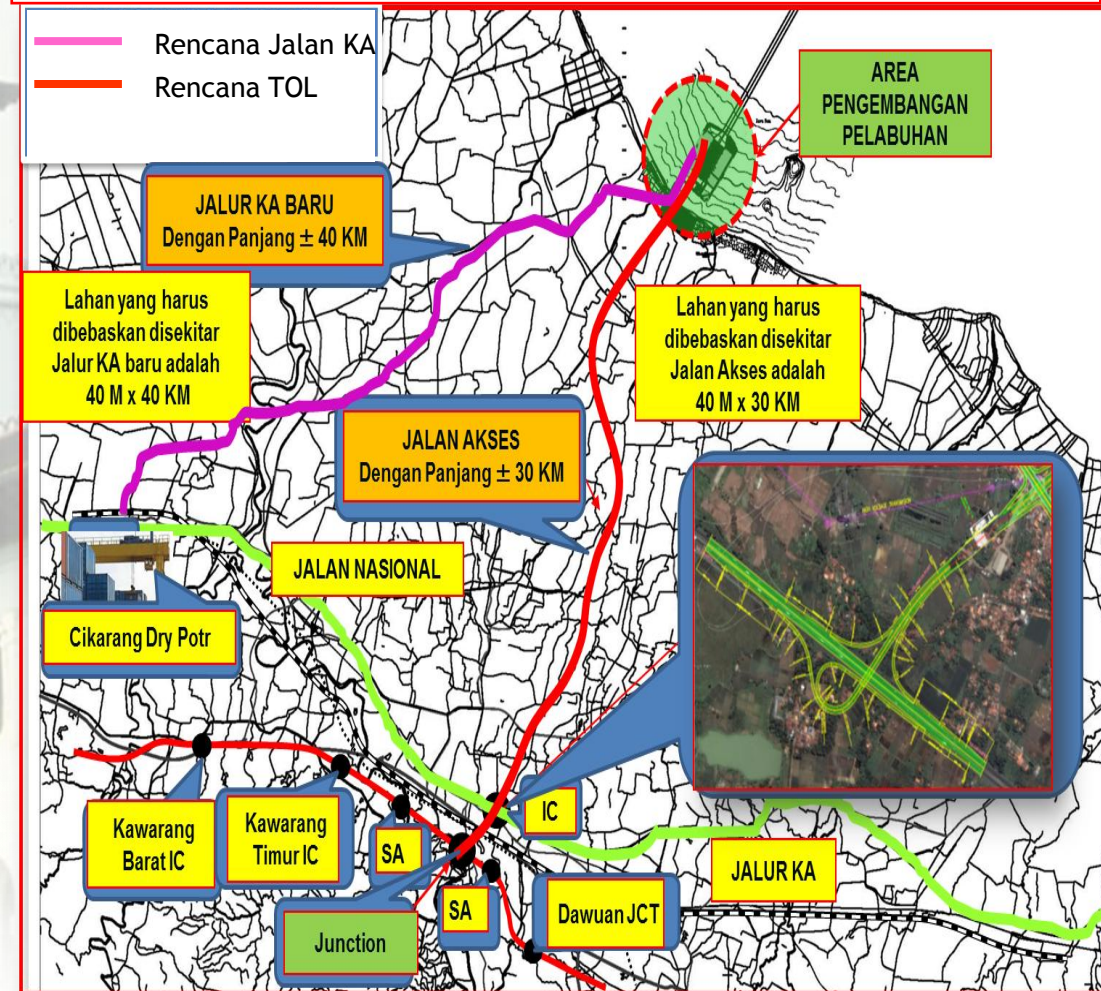
- Larger container volume from individual vessel
- Ultra Large Container Ship (13.000 TEU's) / (17 m)/ Super Panamax Ship
- Ultra Large Container Ship (14.000 TEU's) / (18 m)
- Ultra Large Container Ship (18.000 TEU's) / (16 m) / Triple E-Class

Rencana Pelabuhan Laut Cilamaya dan Kawasan Industri Pendukungnya (11.000 ha)



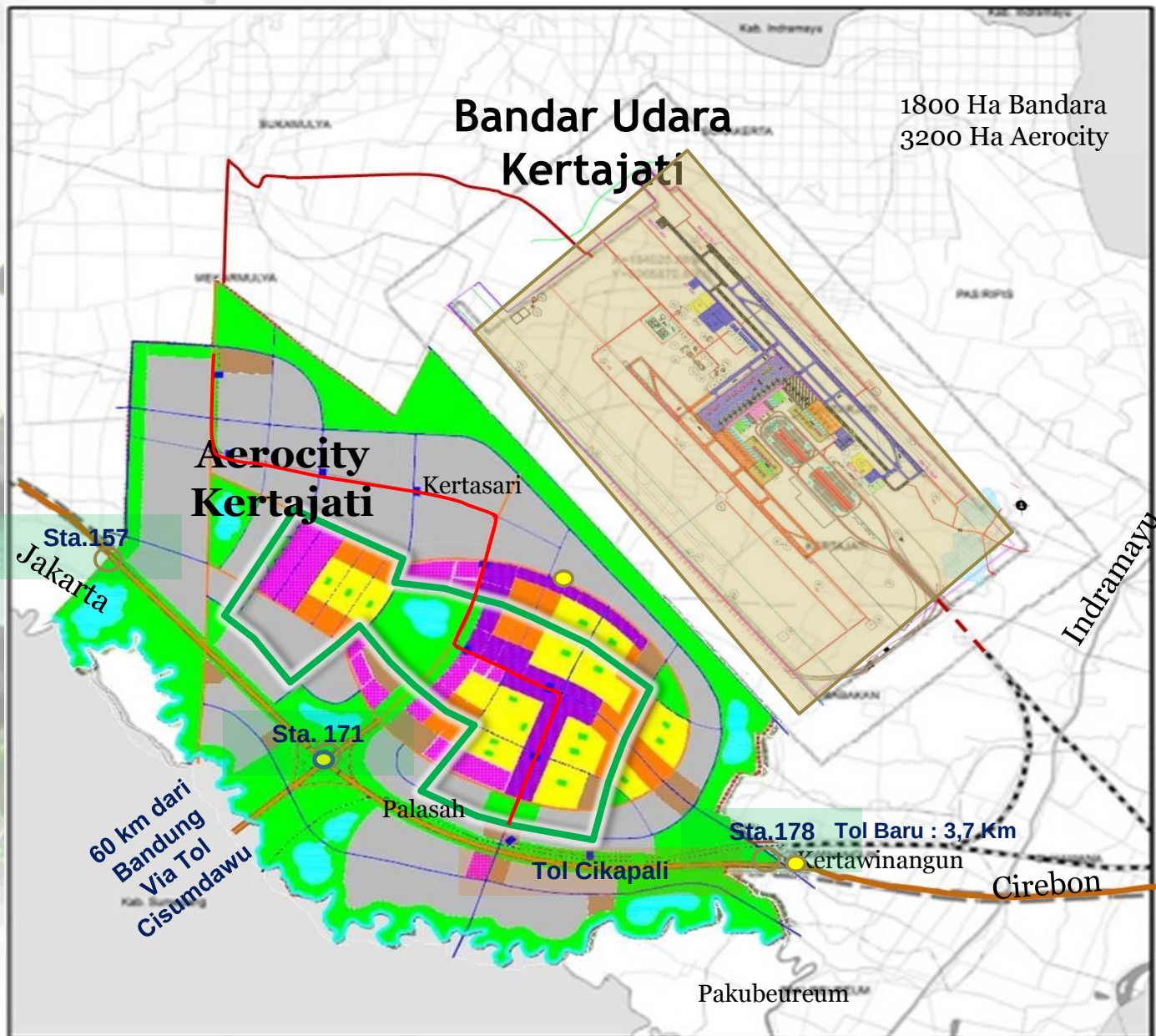
STATUS

- Tahun 2012, Kajian FS oleh Kemenhub bekerjasama dengan JICA
- Tahun 2013, Kajian mengenai keberadaan Pipa Pertamina di Lokasi Pembangunan Pelabuhan Cilamaya oleh Kemenhub bekerjasama dengan konsultan dari Swedia



Ground Breaking oleh Presiden RI diusulkan : akhir tahun 2015

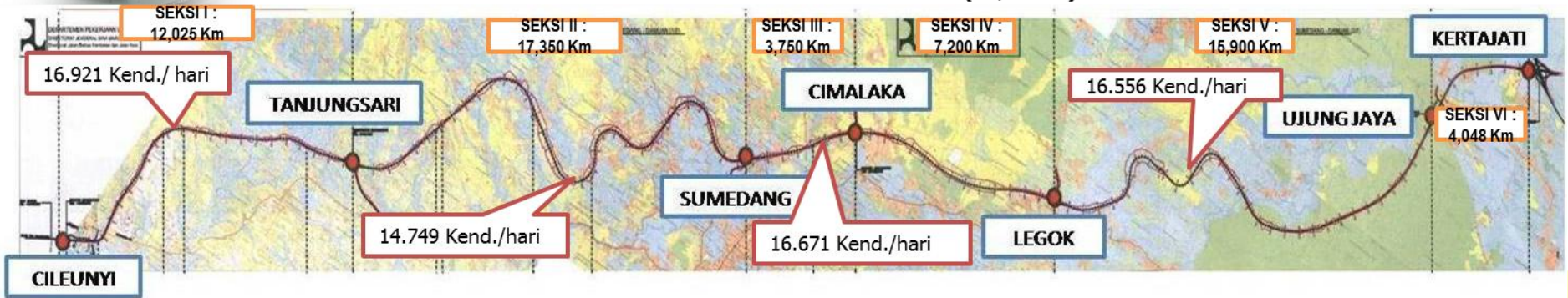
AEROTROPOLIS KERTAJATI JAWA BARAT



DESKRIPSI PROYEK

JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN (60,10 KM)

JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN (58,50 Km)



Deskripsi Proyek

Panjang	: 60,10 km
Biaya Pengadaan Tanah	: Rp 1.295 M
Estimasi Biaya Investasi	: Rp. 10.033 M
Progres Tanah	: 28,58 %
Progres Konstruksi	: 8,42 km (seksi I dan seksi II)
Periode Konstruksi	: 2 tahun (2014-2016)
Masa Konsesi	: 35 tahun
FIRR	: 11.07 %
Operasi	: 2017
Skema Pengusahaan	: BOT

Saat Ini

sepanjang 7,5 Km (selesai tahun 2015), sedangkan sisanya sepanjang 11,5 Km sedang ditenderkan (**direncanakan selesai pada Bulan Februari-Maret 2015**). Pembangunan pada Seksi II Tahap II sepanjang direncanakan selesai dalam waktu 3 tahun

- Adanya rencana perubahan alignment pada Seksi II, IV, dan V, karena kondisi geologis, dan sebagian akan menggunakan Lahan Kehutanan
- Progress pembebasan lahan pada Seksi I sebesar 31 persen, Seksi II sebesar 83,43 persen, Seksi III sebesar 41 persen.

• **Pembebasan Tanah akan diambil alih seluruhnya oleh APBN tahun 2016**

Permasalahan

- Pada seksi II masih terdapat tanah belum bebas di 4 Desa (Citali, Pamulihan, Sukasirnarasa, dan Ciherang) , sedangkan Seksi I, III, IV, V, VI terkendala karena pembebasan lahannya menggunakan aturan sesuai UU No. 2 Tahun 2012
- Tanah Aset desa Pamulihan yang belum terbebaskan dan tanah Wakaf
- 2 Bidang aset Desa Sukasirnarasa berupa Rumah Dinas Sekolah Dasar yang telah dibayarkan oleh dana APBD namun diperjualbelikan oleh aparat desa kepada warga.
- Masih adanya permasalahan pembayaran oleh dana APBD yang diklaim oleh warga belum selesai dibayarkan
- Pada Seksi I, Dibutuhkan dukungan percepatan pembebasan lahan pada Desa Margaluyu

Rencana Tindak Lanjut

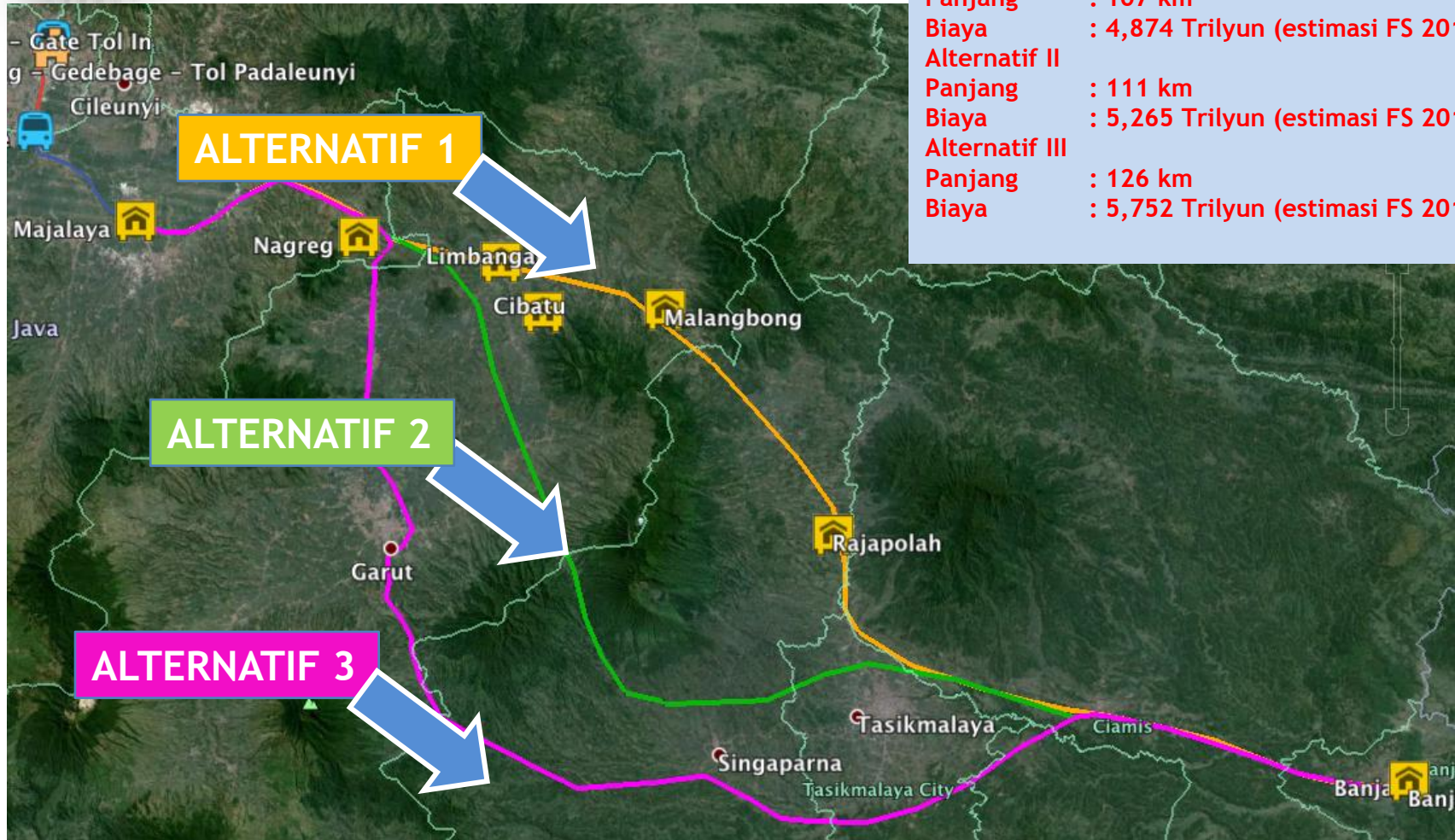
- Diperlukan percepatan proses pembayaran oleh P2T Kab. Sumedang dan PPK Pembebasan Lahan Jalan Tol Cisumdawu. sesuai dengan surat PPK Pembebasan Lahan

RENCANA JALAN TOL CILEUNYI – NAGREG TASIKMALAYA – CIAMIS – BANJAR (CITAS) 107 Km CIAMIS BANJAR (93 Km)



Lokasi	Kab. Bandung, Kab. Garut , Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar
Potret Saat Ini	Pemerintah Provinsi saat ini sedang melengkapi Dokumen Perencanaan seperti FS (2014) , Amdal (2015) dan DED.
Permasalahan	- Dokumen Perencanaan belum lengkap - Belum masuk dalam rencana umum jaringan jalan Tol yang ditetapkan oleh Menteri – PU
Rencana Tindak Lanjut	Kementerian PU diharapkan dapat memasukkan rencana Jalan Tol Cileunyi – Tasikmalaya – Banjar – Pangandaran dalam rencana umum jaringan Jalan Tol

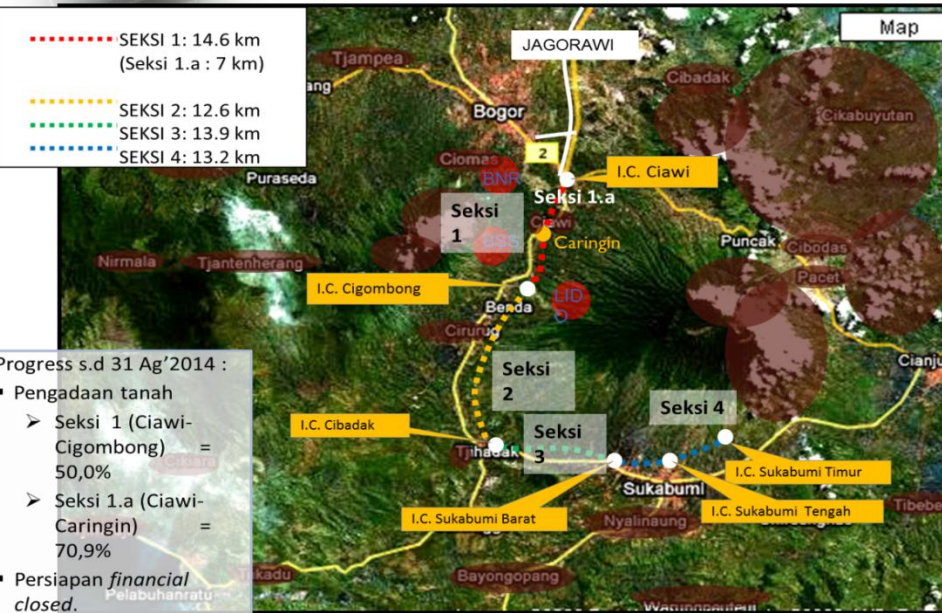
3 ALTERNATIF TRASE TOL CILEUNYI - TASIKMALAYA



Alternatif I	
Panjang	: 107 km
Biaya	: 4,874 Trilyun (estimasi FS 2014)
Alternatif II	
Panjang	: 111 km
Biaya	: 5,265 Trilyun (estimasi FS 2014)
Alternatif III	
Panjang	: 126 km
Biaya	: 5,752 Trilyun (estimasi FS 2014)

Rencana Alternatif Trase Koridor Tol Cileunyi - Tasikmalaya

PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR – CIAWI – SUKABUMI (BOCIMI) 54 Km



Deskripsi Proyek :

Panjang : 54 km (terdiri dari 4 Seksi)

- Sesi 1 : 14.6 km Ciawi – Cigombong
- Sesi 2 : 12.7 km Cigombong – Cibadak Sukabumi
- Sesi 3 : 13.9 km Cibadak – Sukabumi barat
- Sesi 4 : 13.2 km Sukabumi Barat – Sukabumi timur

Lintas Harian Rata-rata : 15.000 kend/hari

Biaya Pengadaan Tanah : Rp 824M

Biaya Investasi : Rp 7,8 T

Lokasi	Kota dan Kabupaten Bogor dan Kab. Sukabumi
Potret Saat Ini	• Pembebasan lahan untuk Seksi I sudah 82 %. • Lelang untuk Seksi I diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2015 bila telah mencapai minimal 70 % pembebasan lahannya. • Untuk Seksi II, III, dan IV rencana pengadaan tanahnya diperkirakan selesai pada 2016
Permasalahan	• Proses pembebasan tanah terhambat karena ketidaksepakatan harga ganti rugi tanah • Masih Pelaksanaan Tender Investasi dan Penetapan SP2LP
Rencana Tindak Lanjut	Dibutuhkan peran Menko Perekonomian untuk mendorong Pemprov Jabar dalam rangka pembebasan lahan

JALAN TOL SOREANG – PASIR KOJA (SOROJA) 10,57 Km

DATA TEKNIS

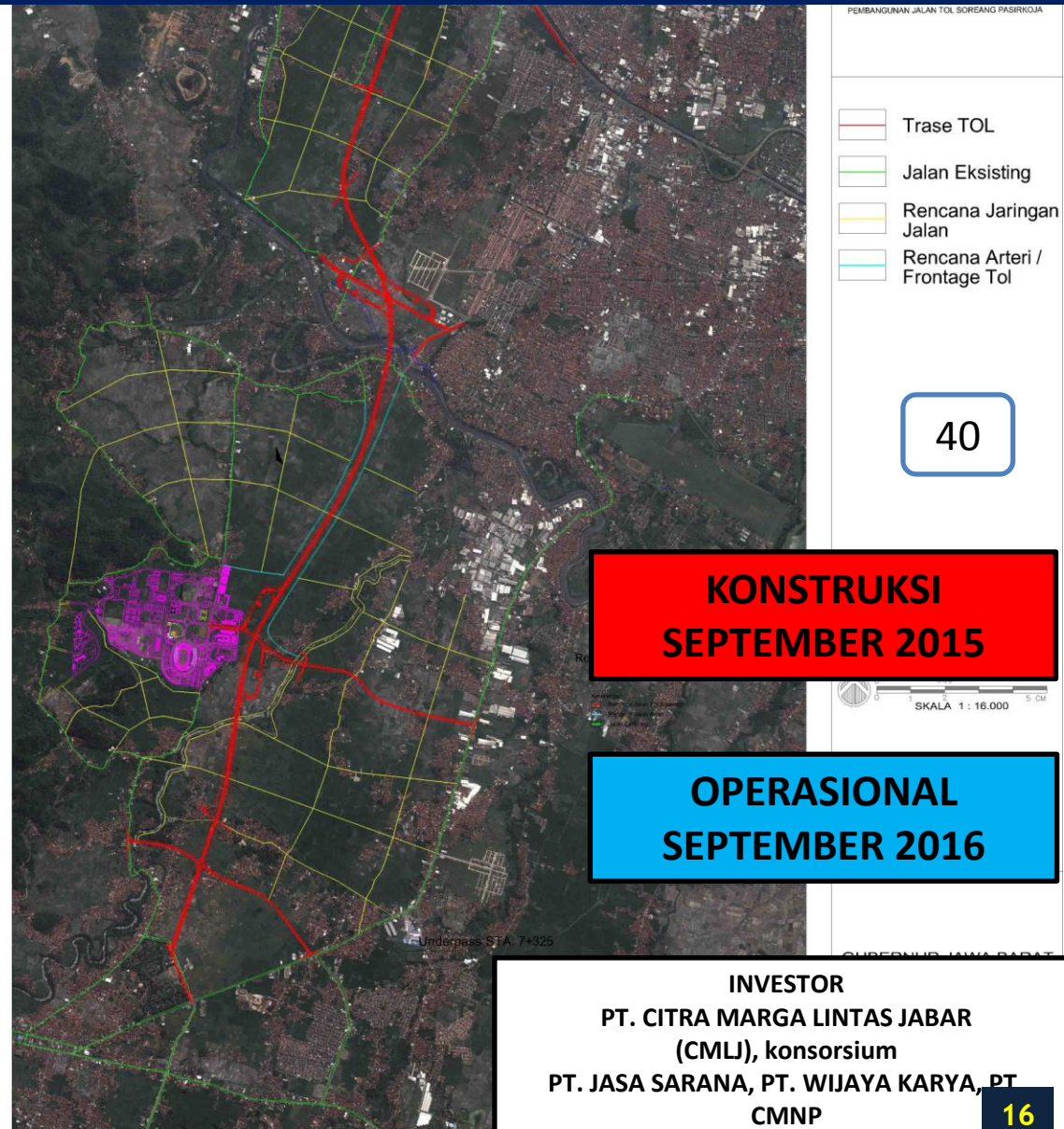
Elemen	Keterangan
Panjang	10,57 Km
Kecepatan Rencana	80 Km/ Jam
Jumlah Lajur	2x2 lajur (awal) 2x3 lajur (akhir)
Lebar Lajur	3,5 m
Lebar Median	3,00 m
Lebar Bahu Dalam	0,5 m
Lebar Bahu Luar	2,0 m
LHR	17.528 Kend/ Jam Thn 2011

DATA FINANSIAL

Elemen	Keterangan
Biaya Investasi	Rp. 1.786 M
Biaya Pengadaan Tanah	Rp. 696 M
Biaya Konstruksi	Rp. 880 M
EIRR	21,12 %
FIRR	14,24 %
Masa Konsesi	45 Tahun
Tarif Gol. I (2016)	Rp. 749/Km
Operasi	2016

Status

Progres Tanah	83,07 % (887,687 m2) dari total kebutuhan 1.068, 618 m2 % (status 22 Desember 2014, Sumber : PPK Pembangunan Tol Soroja Kementerian PU)
Studi Kelayakan	BPJT
Tindak Lanjut	Penyelesaian Konstruksi dan Pembebasan Lahan



JALAN TOL BANDUNG INTRA URBAN TOLL ROAD (27.3 Km)

Data Teknis

Panjang	27.3 Km
Kec Rencana	80 km/jam
Jumlah Lajur	2x2 jalur
Lebar lajur	3,5 m
Lebar Rumija	30 m
Biaya Investasi	6.917 milyar
Biaya Pengadaan Tanah	1.363 milyar
Volume lalu lintas	45.000 kend/hari

	Ruas	Panjang (Km)
1	Trase I-1 (Akses Pasupati – Underpass Gasibu)	5,5
	Trase I-2 (Soekarno Hatta – Gedebage)	4
2	Trases II – 1 (Underpass Gasibu – cicaheum-Ujungberung)	8.8
	Trase II – 2 (Ujungberung – Soekarno Hatta)	2,7
	Trases II – 3 (Ujungberung – Cibiru – Cileunyi)	6,3
	Jumlah	27,3



Status (April 2015)

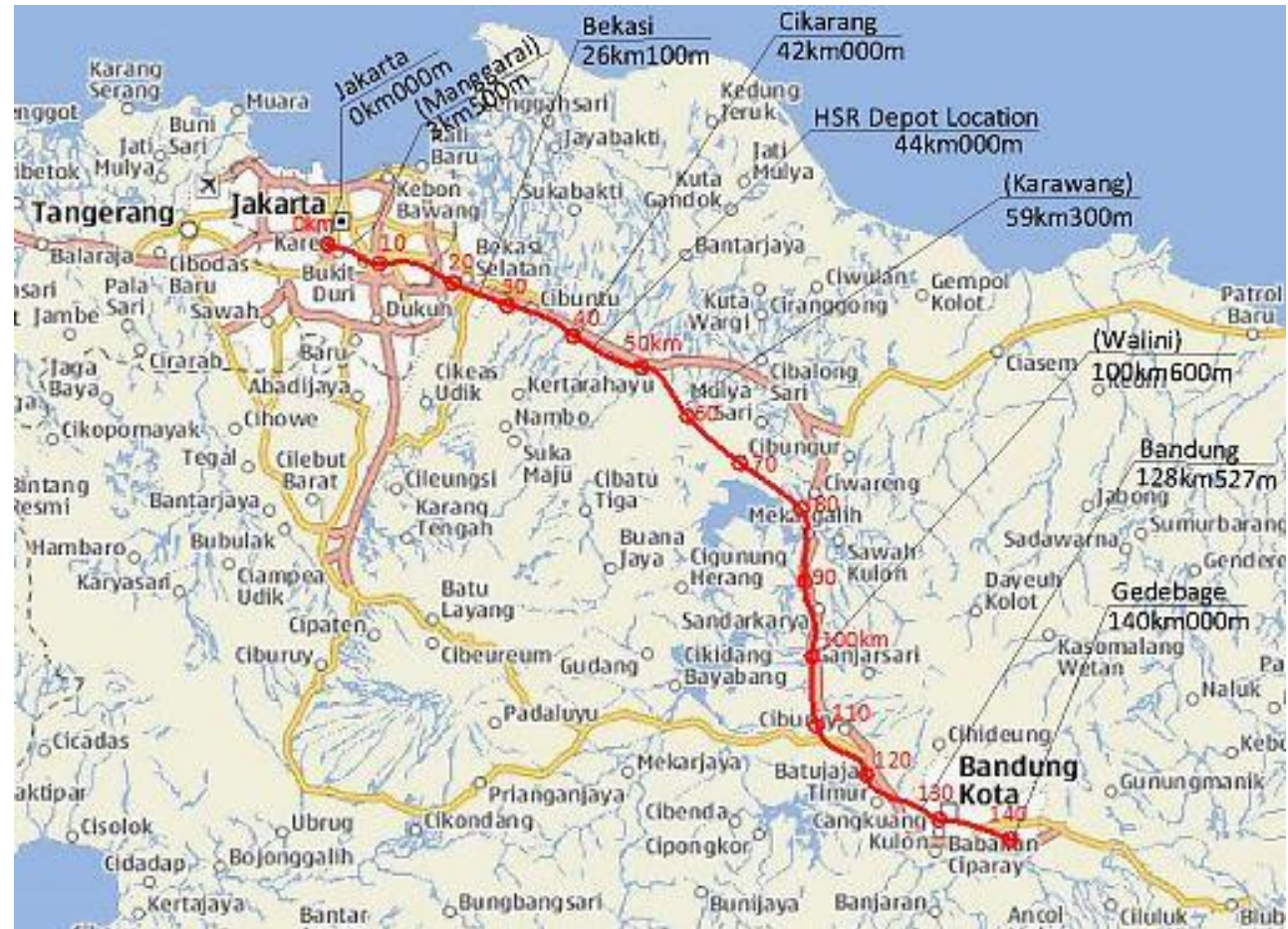
Progres Tanah	Persiapan Pembebasan Tanah
Permasalahan	Perlu ijin pembebasan tanah dari 13 Kementerian/Lembaga yang dikoordinir BAPPENAS
Tindak Lanjut	BAPPENAS dan Kementerian PU akan mempercepat ijin pembebasan tanah sejak 1 Oktober 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JAKARTA-BANDUNG HIGH SPEED RAILWAY

Jakarta - Bandung ditempuh dalam waktu 37 menit

Stasiun	Distance from Jakarta
Jakarta (underground)	0km
(Manggarai* ¹) (underground)	(3.5km)
Bekasi	26.1km
Cikarang	42.0km
(Karawang* ²)	(59.3km)
(Walini* ³)	(100.6km)
Bandung	128.5km
Gedebage	140.0km

Rencana Stasiun Baru



*1 Manggarai : Dibangun setelah rencana pengembangan Manggarai terlaksana

*2 Karawang : Dibangun bersamaan dengan pembangunan bandar udara Karawang

*3 Walini : Dibangun bersamaan dengan pembangunan pusat pemerintahan Pemprov Jawa Barat di Kota Raya Walini

PEMBANGUNAN DAN REAKTIVASI JALUR KERETA API DI JAWA BARAT

PANJANG JALAN REL di JABAR

Aktif : 841,44 Km

Tidak Aktif : 294 Km

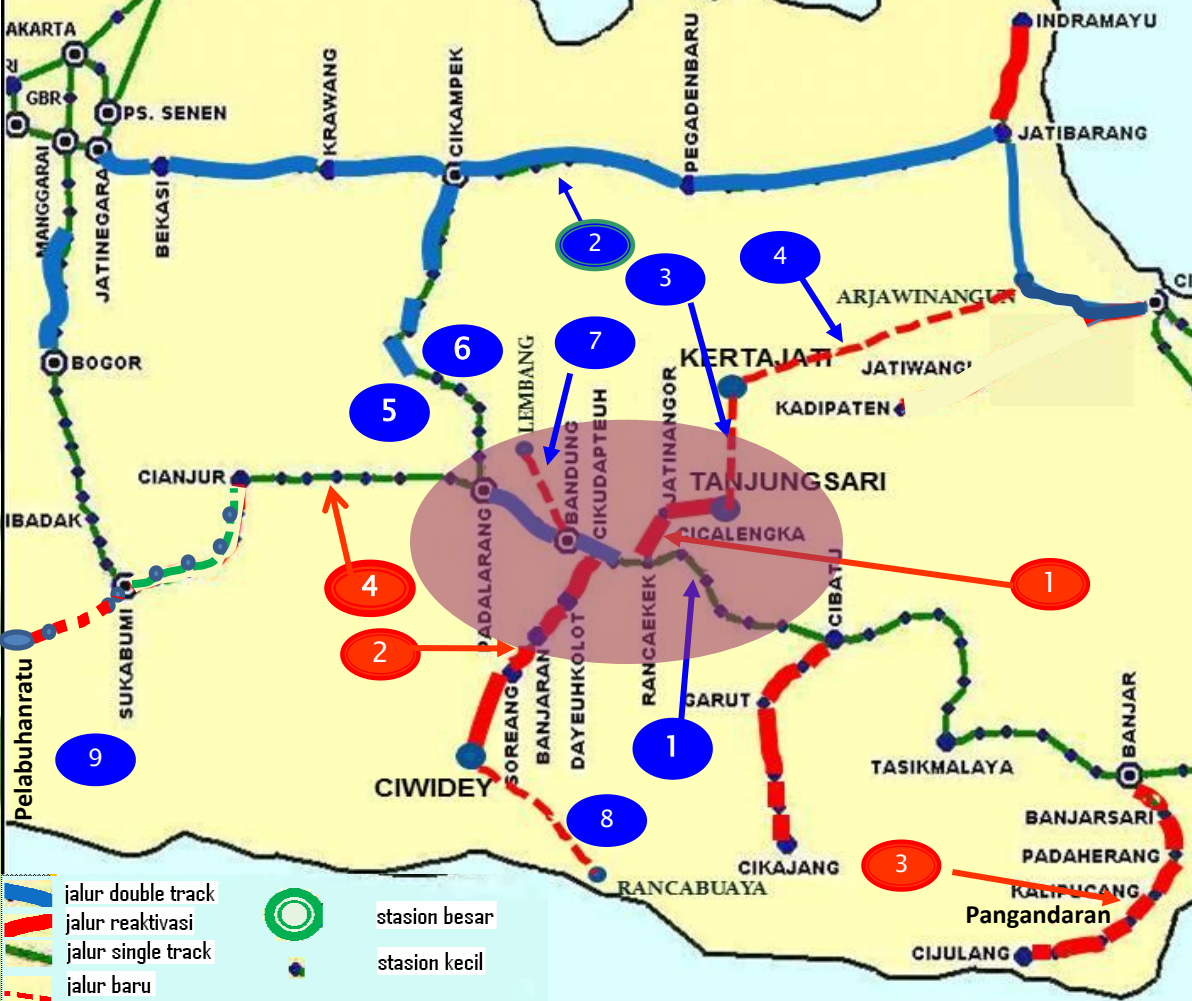
TOTAL : 1135,44 Km

REAKTIVASI/REVITALISASI

N O	LINTAS	Panjang	PROGRESS	2016	2017
1	RANCAEKEK – TANJUNGSARI	12 Km	Studi Kelayakan (2008), Pradesain (2009), DED (2014-2015)	Penanganan Dampak Sosial	Pembangunan
2	BANDUNG – SOREANG – CIWIDEY	40 Km	DED (2010) (Kemenhub)	Penanganan Dampak Sosial	Pembangunan
3	BANJAR – CIJULANG	83 Km	Studi kelayakan 2006 , DED Jembatan dan Terowongan (2016)	Penanganan Dampak Sosial	Pembangunan
4	SUKABUMI-CIANJUR-PADALARANG	83 Km	Operasi(Jalur KA Bogor-Sukabumi), Operasi 2014 - 2015 (Jalur Sukabumi-Cianjur-Padalarang)	Penanganan Dampak Sosial	Pembangunan

PEMBANGUNAN

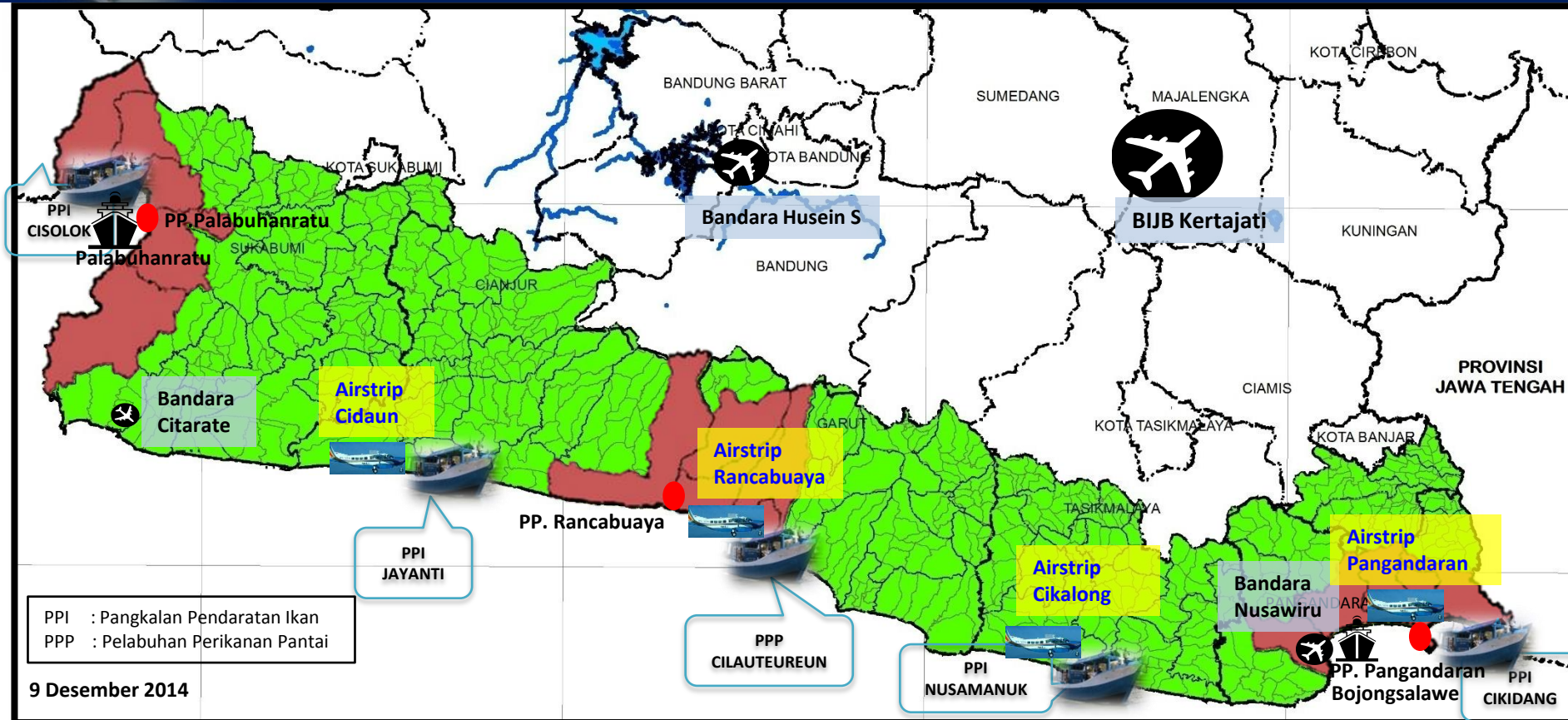
NO	LINTAS	Panjang	Progress	2016	2017
1	DOUBLE TRACK & ELEKTRIFIKASI PADALARANG-CICALENGKA	45 Km	DED 200		
2	SHORTCUT CIBUNGUR-TANJUNG RASA	10,6 Km	DED 2004, Pembebasan Lahan 2010-2014,		
3	TANJUNGSARI-KERTAJATI	104 Km	Pra Desain (2010)		
4	KERTAJATI-ARJAWINANGUN-CIREBON	81 Km		FS	DED dan Pembebasan Lahan
5	SHORTCUT CISOMANG-CIKADONGDONG		Konstruksi 2007-2011		
6	DT CIKADONGDONG-PADALARANG		DED 2007, DED Jembatan (20110 Kemenhub		
7	LEMBANG - BANDUNG (Usulan Jabar)			FS	DED dan Pembebasan Lahan
8	CIWIDEY - RANCABUAYA	45 km		FS	DED dan Pembebasan Lahan
9	SUKABUMI - PELABUHANRATU	46 Km		FS	DED dan Pembebasan Lahan



No.Ruas	Penertiban Lahan	Pembebasan Lahan
1. RANCAEKEK – TANJUNGSARI	√	
2. BANDUNG – SOREANG – CIWIDEY	√	
3. BANJAR – CIJULANG	√	
4. SUKABUMI-CIANJUR-PADALARANG	√	
5. DOUBLE TRACK & ELEKTRIFIKASI PADALARANG-CICALENGKA	√	
6. SHORTCUT CIBUNGUR-TANJUNG RASA		√
7. TANJUNGSARI-KERTAJATI		√
8. KERTAJATI-ARJAWINANGUN-CIREBON		√
9. SHORTCUT CISOMANG-CIKADONGDONG		√
10. DT CIKADONGDONG-PADALARANG		√
11. LEMBANG - BANDUNG (Usulan Jabar)		√
12. CIWIDEY - RANCABUAYA		
13. SUKABUMI - PELABUHANRATU		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2015, diolah

PETA POTENSI PENGEMBANGAN BANDAR UDARA , AIRSTRIP, PELABUHAN LAUT, DAN PELABUHAN PERIKANAN DI JAWA BARAT BAGIAN SELATAN



Kebutuhan Pendanaan : Pelabuhan Perikanan

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi (Kabupaten)	Anggaran (Rp Milyar)
1	PPI CISOLOK	Sukabumi	48
2	PPI JAYANTI	Cianjur	18
3	PPP CILAUTEUREUN	Garut	125
4	PPI NUSAMANUK	Tasikmalaya	50
5	PPI CIKIDANG	Pangandaran	23

Kebutuhan Pendanaan : Infrastruktur Perhubungan

No	Infrastruktur Perhubungan	Lokasi (Kabupaten)	Anggaran (Rp Milyar)
1	BIJB Kertajati	Majalengka	10
2	Bandara Citarate	Sukabumi	5
3	Bandara Nusawiru	Pangandaran	350
4	Airstrip Cidaun	Cianjur	10
5	Airstrip Rancabuaya	Garut	10
6	Airstrip Cikalong	Tasikmalaya	10

No	Infrastruktur Perhubungan	Lokasi (Kabupaten)	Anggaran (Rp Milyar)
7	Airstrip Pangandaran	Pangandaran	10
8	Plb. Palabuhanratu	Sukabumi	N/A
9	Plb. Bojongsalawe	Pangandaran	500

Legenda:

- Wilayah Pengembangan Jabar Selatan
- Pusat Pertumbuhan (PP): Pangandaran, Rancabuaya, dan Palabuhanratu

PERSOALAN DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI JAWA BARAT

PERSOALAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

- Keterbatasan pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur di daerah
- Keterbatasan APBD Provinsi
- Keterbatasan APBD Kabupaten/Kota
- Keterlibatan dunia usaha dan masyarakat

HASIL INISIASI

Bandara Internasional Jawa Barat	APBN, APBD, Pinjaman daerah/ Obligasi Daerah, dan dunia usaha (BUMD dan swasta)
Penyediaan Air Minum	APBN, APBD, dan dunia usaha (BUMD dan Swasta)
Pengelolaan sampah dan air limbah	APBN, APBD, dan dunia usaha (BUMD dan Swasta)
Jalan Toll	APBN, dan dunia usaha (BUMN, BUMD dan Swasta)
Permukiman	APBN
Energi	APBN, APBD dan dunia usaha (BUMN, BUMD dan swasta)
Dan lain sebagainya	

UPAYA PEMERINTAH DAERAH

- Diperlukan inovasi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
- Diperlukan terobosan/inovasi untuk menciptakan sumber pembiayaan baru guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah
- Diperlukan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan badan usaha (BUMN, BUMD, swasta)

TAHAPAN INISIASI

- Identifikasi proyek strategis daerah dan dapat dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan kewenangan/urusan daerah
- Alternatif pembiayaan
- Konsep pengembangan investasi daerah
 - investasi pemerintah daerah
 - investasi BUMD
 - investasi PMA/PMDN
- Mengundang keterlibatan dunia usaha/masyarakat untuk

Obligasi Daerah Merupakan Skema Khusus Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Percepatan Pembangunan infrastruktur strategis Daerah

KEBUTUHAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DI JAWA BARAT

NO	INFRASTRUKTUR	RINCIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN
A. Darat	1. Jalan Tol		69.979.907.565.043
	2. Non Jalan Tol		4.261.909.934.730
	3. Pembangunan Fly Over		1.813.000.000.000
	4. Reaktivasi dan Revitalisasi Jalur Kereta Api		1.904.000.000.000
	5. Pembangunan Jalur Kereta Api		10.427.343.000.000
	6. Pembangunan Terminal		328.400.000.000
B. Udara	7. Pengembangan dan Pembangunan Bandara		9.799.000.000.000
C. Laut	8. Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Laut		9.745.445.549.551
D. Sumber Daya Air	9. Pembangunan Waduk		12.973.017.748.432
	10. Pembangunan D.I dan Bendung		10.434.110.000.000
E. Permukiman	11. Permukiman Perkotaan		53.225.821.770.407
	a. Kawasan Permukiman		18.818.759.672.000
	b. Pengolahan Sampah dan Air Limbah		4.501.434.319.222
	c. Penyediaan Air Bersih		29.908.627.779.185
	12. Permukiman Perdesaan		14.789.370.000.000
	Infrastruktur Dasar Permukiman		14.789.370.000.000
F. Energi	13. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik		75.122.000.000.000
	14. Pengembangan Sumber Energi Listrik		301.354.035.000.000
G. Optimalisasi Kawasan Industri	15. Optimalisasi Kawasan Industri		9.963.000.000.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			586.123.360.568.163

SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT 2025



ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

JAWA BARAT GREEN PROVINCE



PELUANG DAN TANTANGAN PENERBITAN SUKUK/OBLIGASI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PELUANG PENERBITAN SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)

PENDUDUK INDONESIA MERUPAKAN TERBESAR KEEMPAT DI DUNIA (3,5 % DARI JUMLAH PENDUDUK DUNIA), DENGAN PENDUDUK MAYORITAS BERAGAMA MUSLIM TERBESAR DI DUNIA



PESATNYA PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH BAIK DALAM LINGKUP NASIONAL MAUPUN GLOBAL



PENTINGNYA PELIBATAN INSTITUSI PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PERORANGAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH



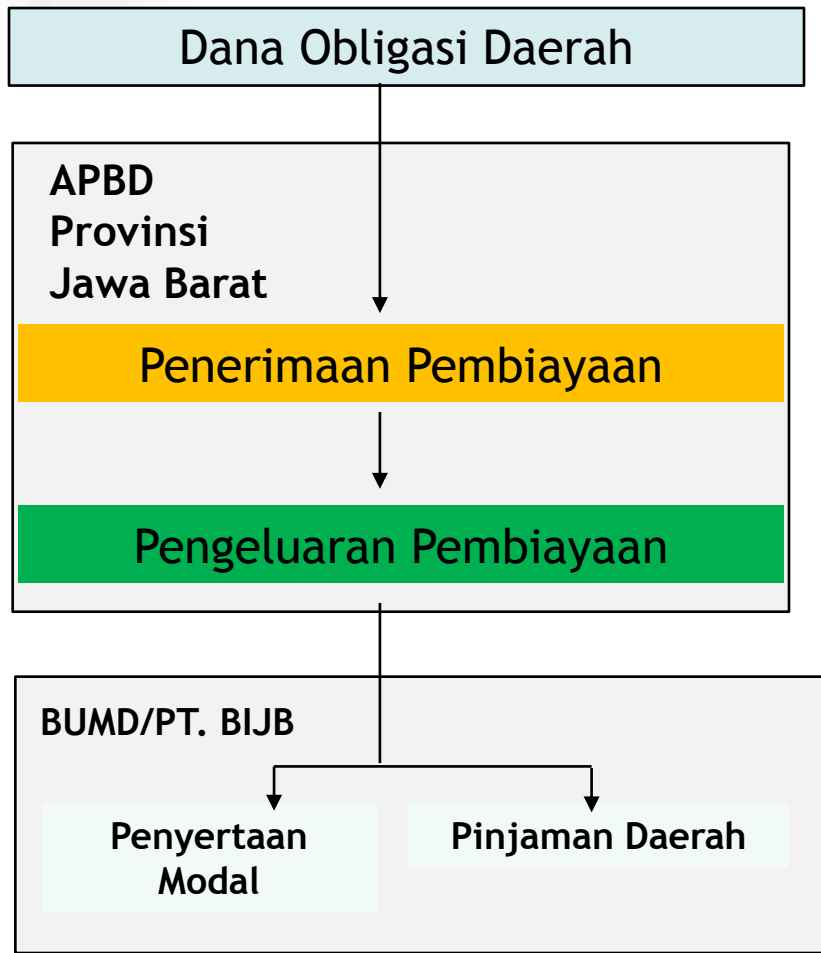
UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MEMANFAATKAN POTENSI SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)

A. MELAKUKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH : PEMBENTUKAN BIRO INVESTASI DAN BUMD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

B. MENDORONG SELURUH BUMD UNTUK MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAH

C. MEMBANGUN ROLE MODEL SKEMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MELALUI SUKUK/OBLIGASI

SKEMA RENCANA PENERBITAN DAN PENERUSAN OBLIGASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARUDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB)





RENCANA OBLIGASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



“Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan diluncurkan dengan jumlah emisi paling tinggi sebesar **Rp. 4 triliyun**, jangka waktu pinjaman paling lama **10 Tahun** dan tingkat imbal hasil paling tinggi **10 persen**”



TANTANGAN PENERBITAN SUKUK (OBLIGASI SYARIAH)

- a. Sukuk/Obligasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk membiayai pembangunan salah satu Infrastruktur Strategis, sehingga perlu melakukan penguatan regulasi dan supervisi dari pemerintah pusat
- b. Pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menciptakan kepercayaan masyarakat dan dunia perbankan untuk terlibat dalam pembiayaan pembangunan melalui Sukuk/Obligasi
- c. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur



PENUTUP

“PENERBITAN SUKUK /OBLIGASI SEBAGAI SKEMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MERUPAKAN MODAL BERTAMBAH DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH”

“TUJUAN PENERBITAN SUKUK/OBLIGASI BUKAN MASALAH MEMAKSIMALKAN BESARAN NILAINYA SAJA. NAMUN, BAGAIMANA MENGELOLA HUTANG. JADI BUKAN HANYA SEKEDAR MEMINJAM UANG DARI MASYARAKAT, TAPI HARUS ADA PENGELOLAAN RESIKONYA JUGA”



TERIMA KASIH